

LAMPIRAN
LAPORAN TAHUNAN KPK
2020

**DIREKTORAT
PEMBINAAN
JARINGAN
KERJA ANTAR
KOMISI DAN
INSTANSI**

Nota Kesepahaman / Perjanjian Kerja Sama

NO	MITRA	KETERANGAN
1.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	Nota Kesepahaman antara KPK dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dilakukan secara desk to desk pada tanggal 27 April 2020.
2.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Nota Kesepahaman antara KPK dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tanggal 14 Juli 2020 dengan lingkup kerja sama yang disepakati : a. Pertukaran Informasi dan Data; b. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; c. Pendidikan dan Pelatihan; d. Pengkajian dan Penelitian; e. Penyediaan Narasumber dan Ahli; dan f. Lingkup lainnya yang disepakati oleh para pihak
3.	Kementerian Keuangan	1. Nota Kesepahaman antara KPK dan Kementerian Keuangan tentang Kerja Sama dalam Mewujudkan Sistem Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik melalui Pemanfaatan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik Pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 2020. 2. Nota Kesepahaman antara KPK dan Kementerian Keuangan tentang Kerja Sama dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang ditandatangani pada tanggal 1 September 2020 dengan ruang lingkup kerja sama meliputi : a. Pertukaran Informasi dan Data b. Pengelolaan Barang Milik Negara, Benda Sitaan, Barang Rampasan, dan/atau Barang Gratifikasi c. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi d. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia e. Kajian/Penelitian f. Penyediaan Personil, Tenaga Ahli, Narasumber, dan/ atau g. Layanan Pengadaan
4.	Lembaga Administrasi Negara	Nota Kesepahaman antara KPK dengan Lembaga Administrasi Negara pada tanggal 6 Oktober 2020 dengan ruang lingkup: a. Pencegahan tindak pidana korupsi b. Pengkajian dan Penelitian c. Pengembangan kompetensi d. pertukaran informasi dan/atau data e. penyediaan narasumber dan ahli f. kerjasama lainnya sesuai kesepakatan para pihak
5.	Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)	Nota Kesepahaman antara KPK dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tanggal 6 Oktober 2021 dengan rincian ruang lingkup: a. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi b. Informasi dan Data c. Pendidikan dan Pelatihan d. Pengkajian dan Penelitian e. Narasumber dan Ahli f. Lingkup lainnya sesuai kesepakatan para pihak

NO	MITRA	KETERANGAN
6.	Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Nota Kesepahaman antara KPK dengan Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, pada 8 Desember 2020 dengan lingkup kerja sama: a. Sosialisasi dan Kampanye, b. Pendidikan dan Pelatihan, c. Pertukaran Informasi dan Data, d. Penyediaan Narasumber.
7.	Kementerian Kesehatan	1. Nota Kesepahaman antara KPK dan Kementerian Kesehatan terkait Pencegahan Tindak Pidana Korupsi yang ditandatangani pada tanggal 17 Desember 2020 dengan lingkup kerja sama : a. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; b. Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi; c. Penyediaan Narasumber dan Ahli d. Penguatan Kapasitas Internal dan Pengawasan e. Pembangunan Integritas Pegawai dan Organisasi f. Penguatan pengelolaan Pelayanan kesehatan dan fungsi Kementerian Kesehatan sebagai regulator g. Pemantauan proses pengadaan barang dan jasa h. Supervisi dalam rangka pengamanan barang milik Negara berupa aset yang tidak bergerak i. Kordinasi dan supervisi dalam penanganan pandemic/wabah/bencana j. Pertukaran Informasi dan data k. Lingkup lainnya sesuai kesepakatan para pihak 2. PKS antara KPK dan Kementerian Kesehatan terkait Penanganan Pengaduan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 17 Desember 2020 dengan lingkup : a. Penyusunan dan/atau penguatan aturan internal terkait penanganan Pengaduan b. Komitmen pengelolaan penanganan Pengaduan c. Penanganan Pengaduan melalui aplikasi d. Kordinasi dan kegiatan bersama penanganan Pengaduan e. Pertukaran data dan/atau informasi
8.	Lembaga Penelitian FH Universitas Ichsan Gorontalo	Perjanjian Kerja Sama (PKS) Kajian Putusan Hasil Rekam Sidang Tipikor antara PPK Deputi Informasi dan Data (INDA) dengan Lembaga Penelitian FH Universitas Ichsan Gorontalo, 27 April 2020
9.	Pusat Studi Anti-Korupsi FH Universitas Pendidikan Ganesha Denpasar	PKS Kajian Putusan Hasil Rekam Sidang Tipikor antara PPK Deputi INDA dengan Pusat Studi Anti-Korupsi FH Universitas Pendidikan Ganesha Denpasar, 11 Mei 2020
10.	PT MRT Jakarta (Perseroda)	Perjanjian Kerja Sama antara KPK dan PT MRT Jakarta (Perseroda) tentang Kampanye dan Pendidikan Antikorupsi yang ditandatangani pada tanggal 1 Juli 2020 dengan ruang lingkup : a. Pemanfaatan ruang media dan ruang publik di Stasiun MRT Jakarta sebagai sarana kampanye edukasi antikorupsi milik Pihak Kedua b. Penyelenggaraan pendidikan antikorupsi dengan melakukan pengembangan sumber daya manusia Pihak Pertama dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, dan sertifikasi terkait antikorupsi

NO	MITRA	KETERANGAN
11.	Pemerintah Daerah Kota Bogor	PKS interkoneksi data Pajak Bumi dan Bangunan dengan Pemda Kota Bogor pada 7 Agustus 2020
12.	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	PKS antara KPK dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait Penanganan Pengaduan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ditandatangani pada tanggal 4 November 2020 dengan lingkup kerja sama : a. Penyusunan dan/atau penguatan aturan internal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang mengatur penanganan pengaduan; b. Pengelolaan komitmen penanganan pengaduan; c. Penanganan pengaduan melalui aplikasi; d. Koordinasi dan kegiatan bersama penanganan pengaduan; dan e. Pertukaran data dan/atau informasi f. Bidang-bidang atau hal-lain yang disepakati Para Pihak.
13.	Yayasan Auriga	PKS antara KPK dan Auriga. Yayasan Auriga adalah sebagai agen pelaksana program yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Norwegia dalam kerja sama antara KPK dan Pemerintah Norwegia untuk melaksanakan program Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dan PPNS di Sektor SDA.
14.	PKS lainnya	1. PKS tentang Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara KPK dengan 21 Mitra Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, BUMN, dan BUMD yang diselenggarakan serentak pada tanggal 21 Desember 2020 dengan rincian lembaga mitra sebagai berikut : Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Badan Pengelola Keuangan Haji, Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat, PT Perkebunan Nusantara III, PT Angkasa Pura II, PT Bank Pembangunan Daerah Jambi. 2. PKS Penelitian ACS-4 2020 dengan mitra Perguruan Tinggi. Proposal penelitian terkait isu korupsi yang diajukan oleh mitra perguruan tinggi ini selanjutnya diseleksi. Proposal yang lolos seleksi selanjutnya dilakukan penelitiannya dengan bekerjasama dengan KPK dan para akademisi.

Implementasi Kerja Sama dengan Mitra di Dalam dan Luar Negeri

NO	MITRA	KETERANGAN
MITRA LUAR NEGRI		
1.	Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training (OPDAT)	Memfasilitasi permintaan unit forensic accounting, Direktorat Monitor untuk mengoordinasikan narasumber dari Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training (OPDAT) dalam kegiatan sharing session tentang penerapan accounting forensics dalam penyelidikan kasus, 27 Januari 2020 di KPK
2.	Malaysia Anti Corruption Commission (MACC)	1. Memfasilitasi permintaan dari Malaysia Anti Corruption Commission (MACC) untuk belajar tentang digital forensics dari Unit Digital Forensik, Direktorat Monitor, 4 Februari 2020, di KPK. 2. Memfasilitasi permintaan Malaysia Anti Corruption Commission (MACC) untuk belajar tentang pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN di Indonesia, 25-26 Februari 2020 di KPK.
3.	Asset Registration & Verification Authority (ARVA)	Memfasilitasi permintaan Asset Registration & Verification Authority (ARVA) untuk belajar tentang pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN di Indonesia, 17-21 Februari 2020 di KPK.
4.	Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU)	Memfasilitasi permintaan Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) untuk belajar tentang pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN di Indonesia, 25-26 Februari 2020 di KPK.
5.	ACRC Korea	Memfasilitasi permintaan data terkait integrity assessment KPK kepada ACRC Korea
6.	OECD	Partisipasi dalam Survey Law Enforcement Impact OECD
7.	OECD dan USAID Cegah	Direktorat PJKAKI memenuhi permohonan narasumber dari OECD dan USAID Cegah pada Focus Group Discussion (FGD) The High Level Reporting Mechanism in Indonesia pada 19 November 2020. Permohonan narasumber ini dipenuhi oleh Direktorat Gratifikasi dan juga Direktorat PJKAKI.
8.	U4	Direktorat PJKAKI menyelenggarakan kegiatan peluncuran virtual dan diskusi teknis hasil kajian antara KPK dengan U4 tentang korupsi di sektor kehutanan pada tanggal 16, 24, 25 November 2020. kegiatan ini adalah hasil kerjasama antara KPK, U4 dan GIZ.
9.	FBI dan OPDAT	Direktorat PJKAKI menyelenggarakan kegiatan training dan Sharing Session Surveillance dan CHIS secara offline dengan menghadirkan narasumber dari FBI dan OPDAT pada tanggal 30 November - 4 Desember 2020.

Implementasi Kerja Sama Nasional

NO	MITRA	KETERANGAN
APARAT PENEGAK HUKUM		
1.	Department of Home Affairs Australia	Telah dilaksanakan koordinasi antara KPK dengan Department of Home Affairs Australia untuk menyediakan narasumber dari penegak hukum Australia dalam serangkaian kegiatan webinar TPPU yang dilaksanakan pada tahun 2020. Webinar tersebut juga bertujuan untuk mendiseminasikan Buku Panduan Memahami Tipologi Pencucian Uang dari Korupsi dan Strategi Penanganannya. Pelaksanaan diseminasi Buku Panduan Memahami Tipologi Pencucian Uang dari Korupsi dan Strategi Penanganannya dalam serangkaian webinar TPPU (4 webinar) sebagai kerja sama antara PJKAKI dengan ACLC. Peserta dari kegiatan ini adalah penegak hukum, pusat studi/pusat kajian, dan pemangku kepentingan terkait dengan total peserta sejumlah 3.379 orang. Berikut detail kegiatan: a. Webinar Memahami Kerangka Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Korupsi serta Hambatan dan Tantangan dalam Penerapannya pada 24 Juni 2020 b. Webinar Mengenal Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari Tindak Pidana Asal Korupsi pada 1 Juli 2020 c. Webinar Kerjasama Internasional dalam Pemulihan Aset TPPU dengan TPA Korupsi pada 8 Juli 2020 d. Webinar TPPU di Pasar Modal: "Tipologi, Strategi Penanganan dan Pemulihan Aset" pada 22 Juli 2020e. Pertukaran data dan/atau informasi
2.	BPK dan MA	Telah dilakukan koordinasi dengan 2 (dua) instansi yaitu BPK dan MA terkait pemenuhan informasi dan data untuk mendukung upaya pencegahan dan penindakan korupsi.
3.	DJP	Diseminasi Studi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara dengan Pembebanan Kewajiban Pajak pada Perkara Tipikor yang merupakan kerja sama antara Dit. PJKAKI dengan DJP. Kegiatan ini dilakukan dalam 2 (dua) kali webinar pada 12 Agustus 2020 dan 23 September 2020. Peserta dari kegiatan ini merupakan penegak hukum, Kanwil DJP, DBC, BPK, BPKP, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dengan total peserta sejumlah 1500 orang.
4.	Pemerintah Norwegia melalui Yayasan Auriga Nusantara	Kegiatan Program Peningkatan Kapasitas dan Koordinasi Penegakan Hukum di Sektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA-LH) yang merupakan kerja sama antara KPK dan Pemerintah Norwegia melalui Yayasan Auriga Nusantara, yang meliputi: a. Penyusunan Kajian Model Koordinasi Antar Lembaga Dalam Proses Penegakan Hukum Di Sektor Sumber Daya Alam - Lingkungan Hidup. Untuk memperdalam dan memvalidasi data maka dilakukan beberapa kali diskusi daring dengan PPNS, penegak hukum, serta pakar. b. Penyusunan alternatif pemilihan kasus untuk uji-coba penanganan kasus bersama dalam program peningkatan kapasitas dan koordinasi penegakan hukum sumber daya alam dan lingkungan hidup. Alternatif kasus ini disusun berdasarkan hasil diskusi dengan PPNS.

NO	MITRA	KETERANGAN
APARAT PENEGAK HUKUM		
		c. FGD tahap 1 pengembangan platform digital yaitu Knowledge Manajemen Information System (Infobox) untuk menggali kebutuhan penegak hukum dan PPNS terkait pertukaran data, informasi dan pengetahuan yang berguna untuk penegakan hukum SDA LH
5.	Lainnya	1. Review dan perbaikan Buku Panduan Memahami Tipologi Pencucian Uang dari Korupsi dan Strategi Penanganannya yang telah disusun pada tahun 2019. Kemudian setelah selesai diperbaiki, mock up dari buku tersebut dicetak sebagai langkah finalisasi. 2. Setelah mock up Buku Panduan Memahami Tipologi Pencucian Uang dari Korupsi dan Strategi Penanganannya disetujui maka dilakukan serah terima 500 exemplar buku. 3. Perbaikan E-Learning Penanganan TPPU dan Pemulihan Aset di Pasar Modal sebagai kelanjutan dari proses penyusunan e-learning yang telah dilakukan pada tahun 2019. Setelah perbaikan selesai kemudian dilakukan finalisasi dan penyelesaian kontrak antara KPK, AIPJ selaku donor, dan Netpolitian selaku vendor. 4. Pelaksanaan kegiatan Training of Trainer (ToT) Penanganan TPPU dan Pemulihan Aset di Pasar Modal bagian 1 pada 16-19 Juni 2020. Peserta dari kegiatan ToT adalah perwakilan dari Dit. Penyelidikan, Dit. Penyidikan, Dit. Penuntutan, Dit. Labuksi, dan Dit. PJKAKI dengan peserta sejumlah 20 orang. 5. Penyusunan Naskah Akademik Perma Penanganan Benda Sitaan dan Barang rampasan. 6. Penyusunan Studi Pemulihan Hak Korban Tindak Pidana Korupsi. Untuk memperkaya dan memperdalam studi tersebut maka telah dilakukan 4 (empat) FGD dengan detail sebagai berikut: a. FGD pertama pada 27 Juli 2020 mengundang Prof. Dr. Muhammad Mustofa, M.A (Guru Besar Kriminologi UI), Bapak Arsil (Peneliti Lembaga Independensi Peradilan), Zaenal Abidin, S.H., M. Law & Dev (Peneliti isu Perlindungan dan Pemulihan Korban), dan Narendra Jatna, S.H., LL.M (Asisten Khusus Jaksa Agung) untuk membahas konsep dan definisi korban menurut ilmu kriminologi dan viktimologi, kategori korban tindak pidana korupsi dan karakteristiknya dari sisi kriminologi dan pidana, pengaturan dan jaminan perlindungan dan pemulihan hak korban tindak pidana korupsi di level internasional, serta tantangan dan hambatan pemulihan hak korban tindak pidana di Indonesia. b. Pada diskusi kedua yang diadakan pada tanggal 8 September 2020 menghadirkan beberapa narasumber seperti Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. (Guru Besar Hukum Perdata UI), Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S. (Pengajar Hukum Acara Pidana Unpar) dan Ibu Asfinawati, S.H. (Ketua YLBHI) untuk membahas terkait isu dari perspektif pidana dan perdata di antaranya terkait karakteristik korban tindak pidana korupsi, skema yang tersedia dalam hukum pidana dan perdata untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh korban tindak

NO	KEGIATAN	DESKRIPSI
		<p>dilakukan untuk memastikan hukum acara perdata dan sistem eksekusi perdata dapat digunakan secara optimal, dan lain sebagainya.</p> <p>c. Diskusi ketiga yang dilaksanakan pada 18 November 2020 mengundang beberapa narasumber yaitu Dr. Yudi Kristiana, S.H., M.H. dari Kejaksaan, Ibu Hakim Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.H. dari Mahkamah Agung, Ibu Hakim Nani Indrawati, S.H., M.H. dari Mahkamah Agung, dan Bapak Syahril Martanto Wirawan dari LPSK. Diskusi ketiga ini membahas tentang mekanisme penggabungan perkara ganti kerugian, pembuktian pada hakim dan pertimbangan hakim, hubungan antara LPSK dengan korban, penuntut umum, dan apa saja kendala serta yang harus diperbaiki untuk memastikan pemulihan hak korban berjalan efektif.</p> <p>d. Diskusi keempat pada 4 November 2020 dengan narasumber Peter Halpern dari OPDAT US DOJ dan Felipe Falconi dari UNODC membahas bagaimana mekanisme pemulihan hak korban tindak pidana korupsi di Amerika Serikat dan negara-negara pihak UNCAC lainnya dan perbandingannya dengan mekanisme yang tersedia di Indonesia</p> <p>7. Pembagian buku Panduan Memahami Tipologi Pencucian Uang dari Korupsi dan Strategi Penanganannya, Studi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara dengan Pembebanan Kewajiban Pajak pada Perkara Tipikor, Penanganan TPPU dan Pemulihan Aset di Pasar Modal, dan Tata Cara Penanganan Perkara Pidana Korporasi pada penegak hukum, Pengadilan Negeri, DJP, BPK, BPKP, OJK, kampus, NGO, dan pemangku kepentingan terkait lainnya di seluruh Indonesia sebagai bagian diseminasi.</p>
Kementerian, Lembaga, BUMN		
1.	BPN	Penyelenggaraan workshop kerja sama dengan BPN di Yogyakarta pada tanggal 25-26 November 2020, yang melibatkan BPN perwakilan dari seluruh kantor wilayah pertanahan provinsi se-Indonesia. Tujuan workshop adalah untuk mencari solusi untuk kendala di daerah terkait dengan kuantitas dan kualitas database BPN. Database ini lah yang selama ini dimanfaatkan oleh tim penindakan dan pencegahan KPK untuk penelusuran aset maupun berbagai program di pencegahan, maka kualitas data harus terus ditingkatkan.
2.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	KPK dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bekerja sama dengan Sanggar Inovasi Desa melaksanakan kegiatan Kongres Kebudayaan Desa. Kongres tersebut terdiri dari 18 Webinar Tematik, 10 Kegiatan Webinar Festival Kebudayaan Desa, dan Call for Papers. Dari 18 webinar tematik, 8 diantaranya terkait dengan peningkatan partisipasi masyarakat Desa menuju arah tatanan baru yang lebih inklusif dan berintegritas serta antikorupsi. Tema dalam rangkaian ini diantaranya: a. New Normal” Apa dan Bagaimana hidup di Era Pandemi dan Sesudahnya.

NO	KEGIATAN	DESKRIPSI
		<p>b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Perempuan untuk Masa Depan Desa dan Arah Tatanan Indonesia Baru yang Inklusif dan Berintegritas.</p> <p>c. Pemuda Desa: Merekonstruksi Ulang Formasi Strategis Pemuda Desa dalam Tatanan Indonesia Baru.</p> <p>d. Reformasi Birokrasi: Merumuskan tata birokrasi desa yang compatible untuk tatanan Indonesia baru.</p> <p>e. Hukum dan Politik Desa: Membangun habitus politik dan regulasi yang memuliakan martabat manusia dalam tatanan Indonesia baru.</p> <p>f. Prinsip Antikorupsi, Akuntabilitas, dan Transparansi: Membangun sistem dan habitus anti korupsi dari desa untuk tatanan Indonesia baru.</p> <p>g. Datakrasi: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Desa Berbasis Data Menuju Tatanan Indonesia Baru.</p> <p>h. Komunikasi, Media, dan Influencer: Merumuskan kebijakan komunikasi publik dalam tata pemerintahan desa menuju Indonesia baru.</p>
3.	Kementerian BUMN dan BUMD DKI Jakarta	Focus Group Discussion tentang Penyusunan Baseline dan Indikator Monitoring dan Evaluasi terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP, ISO 37001:2016 dan Panduan CEK KPK) di Kementerian BUMN dan BUMD DKI Jakarta (13 November 2020). Rapat Pembukaan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan kepada 6 BUMN dan 8 BUMD DKI Jakarta yang menjadi Pilot Program kegiatan ini (15 Desember 2020).
4.	BNN, BNPT dan FBI/OPDAT	Pelatihan/Sharing Session bersama BNN, BNPT dan FBI/OPDAT yang dikoordinasi oleh PJKAKI (30 November - 4 Desember 2020).
5.	Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Kegiatan studi bersama, antara KPK dengan Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tentang “Valuasi Aset Negara dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara”. Dari studi tersebut, diselenggarakan 4 Focus Group Discussion dengan tema Studi Valuasi Aset Negara dan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, tanggal 22 Oktober 2020
6.	Perbankan	Workshop dengan Perbankan terdiri atas 2 Batch yaitu Batch 1 tanggal 20 s.d. 27 Juli 2020 dan Batch 2 tanggal 3 s.d. 10 Agustus. Kegiatan IHT Perbankan yang bekerja sama dengan Direktorat Monitor dengan mengundang 8 PJK sebagai narasumber yg terdiri dari 4 Bank BUMN dan 4 Bank Swasta.
7.	Kementerian ATR/BPN	Workshop implementasi kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN yang mengundang 33 perwakilan Kantah dari seluruh Indonesia pada tanggal 25 s.d. 26 November 2020 di Yogyakarta.
Universitas, Pusat Kajian Anti Korupsi, Organisasi Masyarakat Sipil, dan Pegiat Antikorupsi		
1.	Pusat Kajian Konstitusi Universitas Andalas	1. Penyelenggaraan kegiatan Anticorruption Summit 4 pada tanggal 18-19 November secara daring bersama Pusat Kajian Konstitusi Universitas Andalas Sumatera Barat, Kemitraan, AIPJ-2 dan SPAK.

NO	KEGIATAN	DESKRIPSI
		<ol style="list-style-type: none"> Pemilihan 10 proposal penelitian terbaik Anti-Corruption Summit FGD rancangan laporan hasil penelitian Anti-Corruption Summit-4 2020 untuk memastikan kualitas hasil penelitian yang layak didiseminasikan kepada masyarakat luas dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademis, serta memberikan kontribusi bagi kerja KPK, maka diadakan rangkaian FGD rancangan laporan hasil penelitian secara online
2.	Lembaga Penelitian FH Universitas Ichsan Gorontalo dan Pusat Studi Anti Korupsi Undiksha Denpasar	Kajian putusan pemanfaatan hasil rekam sidang tipikor yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian FH Universitas Ichsan Gorontalo dan Pusat Studi Anti Korupsi Undiksha Denpasar.
3.	Yayasan Auriga, Tempo, Change.org	Melaksanakan kegiatan Pelatihan Jurnalistik Online dimulai tanggal 24 Juni - 29 Juli sebagai implementasi kegiatan Peningkatan Kapasitas Penegakan Hukum dalam isu SDA bersama Auriga dan Tempo. Bersama change.org, Auriga, dan Tempo menyelenggarakan diskusi online sesi kedua bulan Juli 2020
4.	GIZ	<ol style="list-style-type: none"> Koordinasi awal bersama tim GIZ untuk dukungan kegiatan di Papua & Papua Barat Asesmen kebutuhan implementasi peningkatan kapasitas di Sorong, Merauke, dan Jayapura. Melakukan dua kali diskusi rencana kegiatan International Civil Society Forum (ICSF) bersama GIZ Berpartisipasi dalam kegiatan diskusi rencana pembuatan dashboard Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bersama GIZ, KPK, dan Perwakilan CSO
5.	Transparency International Indonesia (TII)	<ol style="list-style-type: none"> Koordinasi bersama Transparency International Indonesia (TII) terkait rencana kegiatan dalam lingkup Open Government Partnership (OGP) yang akan berupa peningkatan kapasitas kepada CSO sesuai dengan kebutuhan dikaitkan dengan isu yang relevan saat ini yaitu pandemi covid-19 Koordinasi bersama dengan TII terkait kebutuhan daftar CSO di 34 propinsi untuk program KAD dari direktorat Gratifikasi.
6.	Mitra CSO Papua dan Papua Barat	Penyelenggaraan diskusi dengan mitra CSO dari Papua dan Papua Barat dan pelatihan jurnalisisme warga bersama dengan peserta dari Papua sebagai implementasi program komponen 5 proyek Norwegia
7.	UNODC dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil kajian Corruption Risk Assessment (CRA) bersama tim, UNODC, dan pemprov kalimantan timur
8.	Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan perekaman sidang sidang Tipikor oleh mitra Perguruan Tinggi di 33 Provinsi sebanyak 208 kali Penyelenggaraan capacity building kepada Tim Rekam Sidang 33 mitra Perguruan Tinggi di 33 Provinsi dalam 3 (tiga) batch: Batch I : 23-26 November 2020, Batch II : 30 November 2020 - 3, Desember 2020 dan Batch III : 14-17 Desember 2020; Penyelenggaraan FGD jurnalis untuk isu SDA di Papua.

NO	KEGIATAN	DESKRIPSI
		<ol style="list-style-type: none"> Diskusi program SONJO bersama Bapak Rimawan, satgas K/L, dan Direktorat Dikyanmas Penyelenggaraan FGD tahap 2 untuk program kajian legal remedies bersama satgas APH, Komglo, dan Biro Hukum Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pelatihan Keamanan Siber dan Professional Project Management Melaksanakan FGD studi pemulihan korban tindak pidana korupsi
Pemanfaatan kerja sama dengan mitra di dalam negeri maupun luar negeri dalam kegiatan pertukaran informasi dan data		
1.	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Universitas Andalas; KemenkopUKM; Pemda Bogor; Kota Makassar; Kota Denpasar; Kota Surabaya.	Koordinasi dan inisiasi terkait sumber data baru
2.	PPATK, AHU, CV, Maskapai, KPU, Bawaslu, dll	Pemenuhan permintaan internal dari sumber data dalam negeri
3.	Kementerian Hukum dan HAM, NACC Thailand, ICAC Hongkong, CPIB Singapura, FBI, US DOJ, US IRS, US HSI, MACC Malaysia, Ombudsman Filipina, AGD dan Kedutaan Australia, ACRC Korea dan NCS China, FBI AS dan DOJ AS, HSI dan IRS, dan SFO UK.	<p>Pemenuhan permintaan internal dari sumber data luar negeri:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melalui mekanisme Bantuan Hukum Timbal Balik / Mutual Legal Assistance (MLA), PJKAKI telah memfasilitasi 6 kali permintaan yang meliputi pencarian data dan informasi di luar negeri, penelusuran aset, pencarian saksi dan tersangka, dan casework meeting untuk kasus yang melibatkan negara Perancis, Singapura dan Amerika. Permintaan ini diajukan oleh penyidik dan dipenuhi PJKAKI bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM sebagai Otoritas Pusat RI untuk permintaan MLA. Selanjutnya Otoritas Pusat RI meneruskan permintaan bantuan tsb ke Otoritas Pusat di negara yang dituju. Melalui mekanisme kerjasama antar lembaga, PJKAKI telah memfasilitasi 33 kali bantuan dari lembaga mitra luar negeri KPK kepada Penyelidik, Penyidik, Jaksa, Korsupdak, Labuksi dan Dumas untuk penanganan perkara KPK. Mitra KPK di luar negeri untuk tsb diantaranya NACC Thailand, ICAC Hongkong, CPIB Singapura, FBI, US DOJ, US IRS, US HSI, MACC Malaysia, Ombudsman Filipina, AGD dan Kedutaan Australia, ACRC Korea dan NCS China. Bantuan berupa pencarian barang bukti, pengembalian aset hasil tipikor yang ada di luar negeri, penyampaian surat panggilan saksi WNA atau WNI yang berada di luar negeri, pertukaran informasi dan data intelijen, koordinasi pelaksanaan pelatihan kemampuan teknis intelijen, permintaan data profil orang dan perusahaan Singapura yang diambil dari database ACRA Singapura, dan melakukan pertemuan dengan Otoritas Pusat RI mengkoordinasikan tindak lanjut upaya pemulihan aset dari Singapura melalui MLA perampasan aset, melakukan pertemuan koordinasi antara PJKAKI, Penyelidik/ Penyidik/ Jaksa dengan FBI AS dan DOJ AS, HSI dan IRS, dan SFO UK.

NO	KEGIATAN	DESKRIPSI
4.	KY, BUMN dan BUMD DKI Jakarta, Kementerian BUMN	Pemenuhan permintaan mitra dalam negeri: 1. Pemenuhan data dan informasi untuk kegiatan background check calon Hakim Ad Hoc Tipikor, sebagai implementasi kerja sama dengan Komisi Yudisial. 2. Pemenuhan data dan informasi terkait kebutuhan penyusunan kerangka Monitoring dan Evaluasi Sistem Manajemen Anti Suap dari BUMN dan BUMD DKI Jakarta yang menjadi pilot program. 3. Pemenuhan data dan informasi keuangan BUMN ke kementerian BUMN untuk kebutuhan analisis data direktorat Monitoring
5.	Kementerian Hukum dan HAM, NACC Thailand, MJIB Taiwan, IRS AS, SEC AS, MACC Malaysia, SFO Inggris, CPIB Singapura, dan ICAC Hongkong	Pemenuhan permintaan mitra luar negeri: 1. Melalui mekanisme MLA, dilakukan 3 kali pemenuhan permintaan MLA dari negara Thailand, Amerika dan Singapura terkait dengan perkara di negara-negara tersebut. Permintaan berupa pencarian informasi dan data dan penyampaian dokumen. Permintaan MLA diterima oleh Otoritas Pusat RI dari Otoritas Pusat negara asing. Permintaan itu selanjutnya diamanatkan kepada KPK sebagai otoritas kompeten untuk memenuhinya. KPK menindaklanjutinya dengan mencari informasi di wilayah Indonesia sesuai yang diminta dalam MLA. 2. Melalui mekanisme antar lembaga, PJKAKI memfasilitasi 15 permintaan yang masuk dari luar negeri, yaitu permintaan NACC Thailand, MJIB Taiwan, IRS AS, SEC AS, MACC Malaysia dan SFO Inggris terkait penyidikan perkara oleh lembaga-lembaga tersebut yang melibatkan entitas di Indonesia. 3. Selain permintaan yang terkait penanganan perkara, PJKAKI juga memfasilitasi permintaan dalam hal lain misalnya pencarian informasi dan data ke SFO Inggris, CPIB Singapura dan ICAC Hongkong untuk mendukung studi komparasi yang sedang dilakukan direktorat monitor, mendukung upaya mendukung pemulihan aset PT Garuda, database permintaan red notice buron KPK, memberi masukan dan data kepada Kemenkumham untuk draft perjanjian MLA RI-Serbia dan RI-Perancis, dan pemenuhan permintaan data untuk penelitian lainnya baik yang diminta oleh internal KPK maupun mitra eksternal KPK.

Implementasi Kerja sama Multilateral

NO	MITRA	KETERANGAN
1.	United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)	KPK berpartisipasi dalam rangkaian pertemuan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Conference of State parties (COSP) yang diadakan secara virtual Rangkaian pertemuan ini diantaranya: 1. 11th Session of UNCAC Implementation Review Group (IRG) 2. Working Group on Prevention of Corruption 3. First resumed of 11th Session of the Implementation Review Group 4. Second resumed of 11th Session of the Implementation Review Group

NO	MITRA	KETERANGAN
		5. Working Group on Asset Recovery and Expert meeting on international cooperation under the UNCAC. Secara umum KPK mengikuti sesi berbagi pengalaman dan praktik terbaik dari para negara pihak UNCAC maupun para expert terkait pencegahan korupsi, pemulihan aset dan kerja sama internasional termasuk dalam konteks adanya pandemi COVID-19. Pada pertemuan Working Group on Asset Recovery, KPK menyampaikan presentasi tentang praktik baik mengawal rezim KPK juga melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan K/L terkait lainnya yang tergabung dalam delegasi RI untuk menyusun dan memberikan masukan melalui note verbal terkait agenda dalam pertemuan termasuk perkembangan mekanisme review UNCAC.
2.	G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG)	KPK mengikuti berbagai pertemuan G20 ACWG sebagai berikut: 1. Menghadiri Pertemuan G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG) 2020 ke-1, pada 3-6 Februari 2020 di Riyadh, Saudi Arabia. Pada pertemuan ini, KPK berkesempatan untuk menjadi salah satu panelis yang memaparkan mengenai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Indonesia. 2. KPK mengikuti Pertemuan virtual G20 ACWG II dan Joint meeting G20 ACWG dan OECD Working Group on Bribery pada 7-10 September 2020. Delegasi Indonesia terdiri atas KPK dan Kementerian Luar Negeri. 3. KPK berpartisipasi dalam G20 ACWG III dan Ministerial Meeting yang dilaksanakan secara virtual pada 19-22 Oktober 2020. Delegasi KPK pada pertemuan Ministerial Meeting ini dipimpin oleh Ketua KPK. Pada pertemuan ini dilaksanakan pengesahan deklarasi tingkat menteri G20 (Ministerial Communique). Ketua KPK juga menyampaikan beberapa poin intervensi mengenai prioritas program anti korupsi Indonesia. Direktorat PJKAKI bekerjasama dengan Humas untuk menyusun publikasi kegiatan ini. Pada tahun 2020 KPK menjalankan kewajiban selaku focal point pada forum G20 ACWG dengan secara aktif memberikan masukan pada berbagai dokumen kesepakatan antara lain melalui berbagai koordinasi internal dan eksternal dengan tim Stranas PK, koordinasi eksternal dengan Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun (KPSRB) Bappenas, Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata (KIPS) dan Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan (PI Polkam), Kementerian Luar Negeri dan melakukan diseminasi hasil kesepakatan G20 ACWG pada K/L yang relevan.

NO	MITRA	KETERANGAN
3.	APEC Anti-Corruption and Transparency Working Group (ACTWG)	KPK berpartisipasi rangkaian pertemuan APEC sebagai berikut: 1. Rangkaian pertemuan APEC ACTWG I di Putrajaya, Malaysia. Pertemuan terdiri atas: a. Tanggal 11 Februari 2020, Launching Ceremony Perdana International Anti-Corruption Champion Fund (PIACCF). Pada pertemuan ini, penyidik KPK, Novel Baswedan menerima award sebagai Anti-Corruption Champion dari PIACCF. b. Tanggal 11 – 12 Februari 2020, Symposium on Gender Mainstreaming and Women Empowerment to Fight Corruption. c. Tanggal 13 – 14 Februari 2020, Pertemuan APEC ACTWG ke 1. 2. Rangkaian pertemuan virtual 31st APEC Anti-Corruption and Transparency Experts Working Group (ACTWG) pada 19-21 dan 23 Oktober 2020. Pada APEC Anti-Corruption Authorities and Law Enforcement Agencies Network (ACT-NET) ke 7 (21 Oktober 2020), KPK memaparkan pengalaman Indonesia dalam menangani kasus suap lintas yurisdiksi. Pada APEC Anti-Corruption and Transparency Experts Working Group's (ACTWG) ke 31 (23 Oktober, KPK memaparkan strategi antikorupsi selama pandemi Covid-19. KPK juga memaparkan progres implementasi Beijing Declaration.
4.	ASEAN Parties Against Corruption (ASEAN-PAC)	1. KPK mengikuti ASEAN-PAC Secretariat Meeting pada 24 Agustus secara virtual. perwakilan Direktorat Litbang menyampaikan paparan pada Agenda 4 mengenai pengalaman KPK dalam upaya pencegahan korupsi pada kebijakan penanganan COVID-19 di Indonesia. 2. KPK berpartisipasi dalam Video Conferencing 4th Forum of Entities Associated with ASEAN yang dilaksanakan pada 20 Oktober 2020 mewakili ASEAN-PAC. 3. KPK mengikuti pertemuan ASEAN-PAC Principals Meeting yang dilaksanakan pada 9 Desember 2020 dimana KPK memaparkan progres anti korupsi di Indonesia. 4. Pertemuan virtual Principals Meeting of ASEAN-PAC pada 9 Desember
5.	Anti-Corruption Initiative for Asia-Pacific	1. KPK pada 25 November 2020 melakukan interview dengan secretariat dari Anti-Corruption Initiative for the Asia Pasific mengenai reformasi anti korupsi di Indonesia dan kebutuhan bantuan teknis Indonesia. 2. KPK mengikuti pertemuan 24th Steering Group Meeting Anti-Corruption Initiative for Asia-Pacific pada 17 Desember 2020 yang akan dilaksanakan secara virtual. Pertemuan ini dilanjutkan dengan pelaksanaan webinar bertajuk "Leveraging open source intelligence, whistleblower protection and reporting, and investigative journalism to combat corruption in times of crisis" pada 18 Desember 2020.
6.	The 19th International Anti-Corruption Conference (IACC)	1. KPK berpartisipasi dalam kegiatan The 19th International Anti-Corruption Conference (IACC) yang diselenggarakan secara virtual pada 30 November – 5 Desember 2020 2. Perwakilan KPK juga menjadi narasumber panelis di beberapa rangkaian diskusi diantara:

NO	MITRA	KETERANGAN
		a. Sesi diskusi dengan tema "Towards Stronger Anti-Corruption Agencies in Asia Pacific" pada 30 November 2020. b. Sesi diskusi dengan tema "To Digitalise or Not to Digitalise for Anti-corruption in the Forestry Sector" pada 30 November 2020.
7	International Anti-Corruption Academy (IACA)	Berpartisipasi pada pertemuan virtual 9th Session of the International IACA's Assembly of Parties (AoP) pada 30 November
8.	Pelaksanaan Pengukuran Risiko Korupsi Peradilan dan implemetasi Pasal 11 UNCAC	Bersama Bawas Mahkamah Agung (selaku beneficiaries dari program Pengukuran Resiko Korupsi Peradilan). Rangkaian kegiatannya meliputi penyelenggaraan 27 webinar dengan: PTUN Jakarta, PN Banjarmasin, PN Mataram, PN Manado, PN Jakarta, PN Kupang, PN Sidarjo, PN Balikpapan, PN Medan, PN Ambon, PA Banjarmasin, PA Jakarta Timur, PA Sidoarjo, PA Medan, PA Manado, PA Kupang, PA Ambon, PA Mataram, PA Balikpapan, PA Manado, PTUN Ambon, PTUN Banjarmasin, PTUN Mataram, PTUN Manado, PTUN Samarinda, PTUN Surabaya, PTUN Medan, dan Wawancara KY, KPK, Bawas MA, Ombudsman RI dan Peradi.
9.	Diseminasi implementasi UNCAC di Indonesia	1. 5 kali Diseminasi implementasi UNCAC di Indonesia, bekerja sama dengan Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo pada 13 Mei, Universitas Sriwijaya (UNSRI) Palembang pada 11 Juni, Universitas Diponegoro (UNDIP) pada 24 Juni, Universitas Hasanuddin (UNHAS) pada 28 Juli, dan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) pada 5 Agustus dengan peserta mahasiswa dan akademisi di area kampus masing-masing 2. 7 kali Webinar tematik UNCAC dengan tema Manajemen Konflik Kepentingan pada 19 Mei, Transparansi Beneficial Ownership (BO) pada 4 Juni, Dampak dan Korban Korupsi pada 9 Juni, Integritas sektor swasta pada 16 Juni, Foreign Bribery dan Pertanggungjawaban korporasi pada 23 Juni, Jakarta Principles pada 3 Juli dan Whistleblowers Protection in Indonesia pada 24 Agustus, dengan peserta berasal dari publik umum namun
10.	Implementasi inisiatif transparansi Beneficial Ownership (BO)	Transparansi BO dari badan hukum, komitmen Indonesia meliputi melakukan kegiatan dan tindakan penilaian situasi dan risiko saat ini. Direktorat PJKAKI mendorong berbagai stakeholder di Indonesia dalam proses penyempurnaan peraturan nasional dengan tujuan untuk membentuk undang-undang yang komprehensif tentang pemilik manfaat, menetapkan sistem daftar kepemilikan manfaat/BO, mengintegrasikan database, mengumpulkan data, dan memfasilitasi pertukaran informasi. Indonesia mempercepat implementasi transparansi BO setelah diberlakukannya Peraturan Presiden tentang transparansi Beneficial Ownership pada tahun 2018 yang bertujuan untuk menjadi alat yang efektif untuk memitigasi penggunaan badan hukum sebagai wahana untuk menyembunyikan hasil tindak pidana serta risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.

NO	MITRA	KETERANGAN
		<p>Indonesia sedang mengembangkan tonggak pertama transparansi Beneficial Ownership dengan membangun aplikasi pendaftaran pemilik manfaat berbasis web, yang disebut AHU online, yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Direktorat PJKAKI saat ini sedang mendukung pengembangan sistem bendera merah (red flag) pada aplikasi ini.</p> <p>Indonesia juga telah memberlakukan peraturan pelaksanaan seperti Peraturan Menteri tentang Penetapan Koperasi, Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pengakuan Pemilik Manfaat, dan Peraturan Menteri tentang Pengawasan atau Verifikasi Pemilik Manfaat. Pada tahun 2020, Direktorat PJKAKI melakukan beberapa kali diskusi kelompok terfokus mengenai efektivitas penerapan regulasi Beneficial Ownership yang melibatkan pembuat kebijakan dan praktisi.</p> <p>Indonesia secara aktif meningkatkan kerjasama antar kementerian strategis mengenai berbagi informasi mengenai informasi Beneficial Ownership untuk memperkuat database, yang akan sangat berguna dalam mendukung penyelidikan kasus penegakan hukum serta pencegahan korupsi dan pencucian uang. Inisiatif ini juga akan mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya di bidang industri ekstraktif, serta perpajakan, perbankan, dan sektor ekonomi lainnya.</p> <p>Pelaksanaan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan Direktorat PJKAKI untuk mendorong implementasi komitmen Indonesia dalam transparansi data Beneficial Ownership (BO).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. FGD BO Seri 1 dengan tema "Efektivitas kriteria Pemilik Manfaat untuk memudahkan pelaporan BO Korporasi" pada 10 September 2020 2. FGD BO Seri 2 dengan tema "Strategi Memaksimalkan Kepatuhan korporasi dalam Melaporkan Informasi BO" pada 17 September 2020 3. FGD BO Seri 3 dengan tema "Implementasi Pengawasan Korporasi sesuai Permenkumham 21/2019" pada 24 September 2020 4. FGD Kajian legal remedies (pemulihan hak korban korupsi) 5. FGD Good Governanance standar OECD bersama BKF 6. FGD Dinamika Kerja Sama Internasional bersama Biro Hukum 7. FGD 1-3 penelitian 4 Universitas (UGM, UNPAD, ULM, UNS) dan wawancara Pimpinan KPK dengan UNPAD.

1. Webinar Memahami Kerangka Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Korupsi serta Hambatan dan Tantangan dalam Penerapannya pada 24 Juni 2020
2. Webinar Mengenal Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari Tindak Pidana Asal Korupsi pada 1 Juli 2020
3. Webinar Kerjasama Internasional dalam Pemulihan Aset TPPU dengan TPA Korupsi pada 8 Juli 2020

Webinar TPPU di Pasar Modal: "Tipologi, Strategi Penanganan dan Pemulihan Aset" pada 22 Juli 2020

1. Webinar Memahami Kerangka Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Korupsi serta Hambatan dan Tantangan dalam Penerapannya pada 24 Juni 2020
2. Webinar Mengenal Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari Tindak Pidana Asal Korupsi pada 1 Juli 2020
3. Webinar Kerjasama Internasional dalam Pemulihan Aset TPPU dengan TPA Korupsi pada 8 Juli 2020
4. Webinar TPPU di Pasar Modal: "Tipologi, Strategi Penanganan dan Pemulihan Aset" pada 22 Juli 2020